

BAB II

DINAMIKA HUBUNGAN AMERIKA SERIKAT DAN RUSIA.

Perang Dingin yang dimulai pada tahun 1947 yang melibatkan Negara-negara Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dan Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Perang tersebut merupakan perang ideologi juga teknologi antara kedua Negara adikuasa. Perang ideologi dimana Amerika Serikat dengan ideologi kapitalisme dan Uni Soviet dengan ideologi komunismenya. Dan dalam bidang teknologi, Uni Soviet yang melakukan peluncuran *Sputnik* atau satelit Bumi pertama sedangkan Amerika Serikat yang melakukan pendaratan Apollo di Bulan. (Saputra, 2014)

Masuk pada awal pemerintahan John Fitzgerald Kennedy, berakhirnya masalah Kuba pada tanggal 22 Oktober 1962 menjadi penyebab memuncaknya ketegangan dalam hubungan Amerika Serikat dan Uni Soviet yang ditandai dengan suksesnya Kennedy dalam menuntut Uni Soviet untuk merombak pangkalan militernya di Negara Amerika Tengah. Pada masa pemerintahan Ronald Wilson Reagan ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet semakin meningkat dengan adanya pernyataan-pernyataan keras dari Amerika Serikat terhadap Blok Timur. Puncaknya ketika terjadinya penembakan pesawat sipil Korea Selatan. Dalam program senjata nuklir, Reagan melakukan suatu upaya untuk memulihkan citra Amerika Serikat khususnya melawan Uni Soviet yaitu dengan melakukan peningkatan anggaran belanja militer. Berbeda dengan presiden sebelumnya Ronald Reagan, George Herbert Walker Bush melakukan pengurangan anggaran militer untuk mengurangi ketegangan dengan Uni Soviet. (Suhindriyo, 1999)

Sasaran utama dalam pemerintahan presiden Reagan terhadap Uni Soviet yaitu masalah permusuhan dengan Uni Soviet ditempatkan di tingkat prioritas paling tinggi dan menutup celah-celah senjata nuklir untuk meningkatkan

kemampuan Amerika Serikat dalam bidang militer sehingga dapat mengalahkan kemampuan yang dimiliki Uni Soviet. (Rode, Christol, Andreson, & Greene, 2011)

Pada era presiden Ronald Reagan (1981-1989), kebijakan yang dilakukan untuk menegakkan hak asasi manusia adalah memusnahkan musuh demokrasi Amerika Serikat dengan tekad "*To Make America Great Again*". Salah satunya tindakan yang dilakukan adalah terhadap Uni Soviet yang melakukan invasi terhadap Afghanistan. Presiden Reagan menyebut Uni Soviet sebagai "kerajaan iblis". (Jatmika, 2000)

Dalam hubungan Amerika Serikat dan Rusia terdapat tanggungan yang sering diabaikan karena kedua Negara tersebut melibatkan tujuan strategis yang secara konseptual jauh lebih kompleks. Tentu saja, kebijakan yang diambil adalah untuk menjaga masa depan tidak hanya untuk menghadapi masa sekarang. Amerika Serikat ingin melihat stabilitas dunia dalam tiga bentuk. (Aggarwal & Govella, *Responding to a Resurgent Russia : Russia Policy and Responses From the European Union and the United States*, 2012)

Yang pertama, untuk perang dipegang oleh Amerika Serikat maupun Rusia pasca runtuhnya Uni Soviet. Bagi Rusia, ini adalah lingkungan pokoknya, menjaga bahasa yang datang dari luar dan menghadapi persaingan ekonomi yang berputar-putar. Bagi Amerika Serikat, seperti yang dikatakan oleh wakil Menteri Kehakiman, pedalaman dalam wilayah strategis merupakan inti dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Menemukan cara untuk dapat bekerja sama dan yang paling penting adalah hubungan Amerika Serikat dan Rusia, tidak hanya untuk kedua Negara tetapi untuk komunitas internasional yang lebih besar lagi.

Yang kedua, untuk menciptakan lingkungan keamanan yang stabil, efektif dan inklusif. Di Eropa harmonisasi seperti ini sangat menentukan. Apabila Amerika Serikat dan Rusia dapat menemukan cara untuk bekerja sama untuk menghindari terjadinya kebutuhan di Eropa sehingga

Eropa tidak menjadi ancaman keamanan di sepanjang pinggiran timurnya.

Yang ketiga yaitu geostrategic yang berkaitan dengan minat utama dari Amerika Serikat. Tidak ada tantangan strategis yang besar bagi Amerika Serikat kecuali mengelola kebangkitan kekuatan-kekuatan yang baru, khususnya Tiongkok. Jika Amerika Serikat dan Rusia bergabung bersama dalam mempromosikan integrasi Tiongkok ke dalam tatanan internasional, maka peluang besar untuk Amerika Serikat. Namun, jika Rusia memilih untuk mengikuti cara yang dimiliki Tiongkok dalam melawan Amerika Serikat, maka peluang akan sangat kecil. Akhirnya, Amerika Serikat memiliki kepentingan dalam hubungan dengan Rusia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah politik internasional, sistem ini tidak didominasi oleh persaingan strategis yang kuat.

Berakhirnya Perang Dingin, bukan berarti berakhir pula konflik antara kedua Negara adikuasa Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pergantian ideologi Uni Soviet dari Marxisme dan Komunisme yang dilihat sudah tidak efektif lagi dalam mengontrol ekonomi maupun politik Uni Soviet berganti menjadi sosialisme demokratik dan liberalisme. Strategi Amerika Serikat berhasil melalui *containment policy* dalam menghadapi lawannya yaitu Uni Soviet. Seperti yang kita ketahui, Amerika Serikat yang identik dengan ideologi liberalisme dan kapitalisme. Dimana liberalisme dan kapitalisme merupakan ideologi yang unggul hingga saat ini. (Saputra, Dari Uni Soviet Hingga Rusia: Sejarah Panjang, Para Aktor Revolusi, Sera Politik Perang Dingin Rusia Sampai Sekarang, 2014)

Dalam hubungan Amerika Serikat dan Rusia, terdapat empat fokus. Yang pertama adalah keamanan nuklir, bagaimana Rusia dan Amerika Serikat berhubungan dalam mengembangkan opsi tenaga nuklir sipil, kontrol senjata strategis, dan mengelola dunia nuklir multipolar adalah kunci untuk hubungan mereka. Kedua adalah keamanan energi. Ketiga, Moskow dan Washington perlu menghadapi sumber ketegangan utama. Dalam menghadapi ketegangan atas

interaksi Amerika Serikat dan Rusia pasca runtuhnya Uni Soviet, fokus yang keempat adalah keamanan Eropa. Untuk itu, kebijakan Amerika Serikat, NATO, dan Rusia di wilayah pasca Soviet bergantung langsung pada keberhasilan Amerika Serikat dan sekutu NATO dalam menggalang Rusia. (Aggarwal & Govella, 2012)

A. Hubungan Amerika Serikat Dan Rusia Pada Era Presiden Barack Obama.

Hubungan Amerika Serikat dan Rusia tidak jauh-jauh dari perseteruan. Pada tanggal 6 Desember 2012, lembaga legislatif Amerika Serikat mengeluarkan undang-undang anti-Rusia. Kongres Amerika juga mengesahkan “Magnitsky Act” yaitu sebagai “langkah penting bagi perlindungan HAM dan demokrasi”. Dalam arti sempit, undang-undang ini ditujukan kepada pejabat Rusia atas tewasnya konglomerat Sergei Magnitsky dalam tahanan pada tahun 2009. Sedangkan dalam arti luas, ditujukan untuk pejabat Rusia yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Vladimir Putin selaku presiden Rusia melihat Magnitsky Act adalah cara Amerika Serikat untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Amerika Serikat sebagai pemimpin dunia. Perseteruan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet semakin panas dalam masalah politik Timur Tengah dan krisis politik yang dialami Ukraina yang merupakan tetangga dari Rusia. Krisis politik di Ukraina yang ditandai dengan jatuhnya presiden Ukraina Viktor Yanukovich pada bulan Februari 2014. Ukraina merupakan poros geopolitik yang penting dan strategis dalam wilayah Eurasia, yang harus berada dalam pengaruh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya serta Uni Eropa. Menurut Jimmy Carter sebagai arsitek kebijakan politik luar negeri presiden Barack Obama, poros geopolitik adalah Negara-negara yang memiliki lokasi geografis yang cukup penting. (Saputra, Dari Uni Soviet Hingga Rusia: Sejarah Panjang, Para Aktor Revolusi, Serta Politik Perang Dingin Rusia Sampai Sekarang., 2014)

Sejak awal pemerintahan Barack Obama, juru bicara presiden sendiri menekankan pentingnya Rusia. Rusia tetap menjadi satu-satunya tenaga nuklir yang sebanding dengan

Amerika Serikat. Rusia merupakan produsen terbesar di dunia dan Amerika Serikat adalah konsumen terbesar di dunia. Dan sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Rusia akan memiliki suara berpengaruh pada tantangan diplomatik yang paling penting. Pada awal Juli 2009, ketika Obama berpidato kepada para siswa di sekolah ekonomi baru Rusia, Obama berbicara tentang keinginan agar Rusia menduduki tempat yang selayaknya sebagai sebuah Negara yang memiliki kekuatan besar. (Aggarwal & Govella, *Responding to a Resurgent Russia: Russia Policy and Responses From the European Union and the United States*, 2012)

Pada tahun 2009, sebelum berkunjung ke Rusia, presiden Amerika Serikat Barack Obama mengkritik Vladimir Putin merupakan orang yang masih memikirkan masa-masa Perang Dingin. Hal itu menimbulkan ancaman terjadinya konflik terbuka dengan Vladimir Putin yang saat itu menjadi Perdana Menteri Rusia. Menurut Barack Obama, Amerika Serikat memiliki kekuatan militer yang jauh lebih baik dari Rusia, sehingga tidak ada niat untuk melakukan perang dengan Rusia. Namun, Amerika Serikat sudah perang ekonomi dengan Rusia yaitu dengan melakukan sanksi ekonomi untuk perusahaan dan perbankan Rusia. Bagi Amerika Serikat Rusia merupakan pasar yang cukup penting untuk Negara yang mendapat julukan Paman Sam ini. Jika perang antara Amerika Serikat dan Rusia benar terjadi, yang menjadi penting adalah kehancuran dunia bukan siapa yang akan menjadi pemenang. (Saputra, *Dari Uni Soviet Hingga Rusa: Sejarah Panjang, Para Aktor Revolusi, Serta Politik Perang Dingin Rusia Sampai Sekarang*, 2014)

Berbeda antara hubungan Barack Obama dengan Vladimir Putin, hubungan baik justru terjalin antara Barack Obama dan Dmitry Medvedev. Pada tahun yang sama, tahun 2009 walaupun pada bulan yang berbeda terjadi pertemuan antara kedua pemimpin Negara tersebut. Pada bulan April 2009 dalam pertemuan G20 di London, Barack Obama dan Dmitry Medvedev menyatakan bahwa Amerika Serikat dan Rusia siap untuk memetakan awal yang baru dalam hubungan

antara Amerika Serikat dan Rusia. Pada bulan Juli 2009 dalam pidatonya selama KTT di Moskow, Barack Obama menegaskan kembali untuk mengatur ulang hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia terutama dalam bidang penyebaran senjata nuklir, mengisolasi dan mengalahkan kekerasan, meningkatkan kemakmuran global, melindungi hak asasi manusia, dan memajukan kerja sama internasional sambil menghormati kedaulatan negara. Dibandingkan dengan era Bush, hubungan Rusia dengan Amerika Serikat kemudian dapat diperbaiki dan tampil dalam kondisi yang cukup baik di bawah Obama. (Singh, 2012)

Selanjutnya pada bulan September, Barack Obama dan Dmitry Medvedev bertemu kembali pada pertemuan Majelis Umum tahunan Amerika Serikat di New York. Pada saat itu, Dmitry Medvedev menerangkan bahwa Rusia akan bergabung dengan Amerika Serikat dan Negara-negara barat lainnya sehingga dapat menekan Iran untuk membatasi program nuklirnya. Dimana hal itu merupakan salah satu tujuan utama Amerika Serikat dalam kebijakan mengatur ulang hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia ini, yaitu membuat Moskow sepenuhnya dapat bergabung dan bersama-sama mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. (Isikoff & Corn, *Russian Roulette The Inside Story of Putin's War On America and the Election of Donald Trump*, 2018)

Pada bulan April 2010, setahun dan seminggu dari pertemuan pertama presiden Barack Obama dan Presiden Dmitry Medvedev di London, keduanya tiba di Praha untuk menandatangani perjanjian New START. Setelah sesi penandatanganan kedua pemimpin diberi kesempatan untuk merayakan keberhasilan kebijakan luar negeri itu. Dengan negosiasi START yang sulit, pemerintah mendapatkan kembali beberapa momentum yang telah diusahakan dan memberikan angin baru kepada kebijakan Rusia. KTT Medvedev dan Obama di Washington pada 24 Juni 2010 memungkinkan kedua Negara untuk fokus pada kemajuan dalam hubungan Amerika Serikat dan Rusia dan mengumumkan langkah-langkah baru kedepan. Upaya besar

baik dari pemerintahan dan sector swasta dari kedua Negara akan meluncurkan serangkaian inisiatif yang mempromosikan pengembangan ide-ide inovatif di berbagai bidang mulai dari teknologi transportasi yang canggih, sumber energi, hingga nonteknologi. Sebagai langkah awal dari hubungan ekonomi Amerika Serikat dan Rusia yang mulai ditingkatkan, kedua presiden menetapkan 30 September 2010 sebagai batas waktu untuk menyelesaikan langkah-langkah yang diperlukan untuk akses Rusia yang tertunda cukup lama ke Organisasi Perdagangan Dunia. (Aggarwal & Govella, Responding to a Russia : Russia Policy and Responses From the European Union and the United States, 2012)

Pada awal Desember 2010, Rusia dan Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan pada prinsipnya tentang hak kekayaan intelektual, pengadaan pemerintah, dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan terkait perdagangan yang semuanya harus membuka jalan WTO bagi akses Rusia. Proses negosiasi bilateral antara Rusia dan anggota WTO sebagian besar telah selesai. Namun, berbagai Negara mengajukan keberatan atas tawaran keanggotaannya, dengan beberapa kritik terhadap langkah Rusia yang terkesan buru-buru. (Aggarwal & Govella, Responding to a Resurgent Russia : Russia Policy and Responses From the European Union and the United States, 2012)

Pada akhir masa jabatan Barack Obama sebagai presiden Amerika Serikat yang telah menjabat selama dua periode itu, mengambil langkah untuk mengusir diplomat Rusia karena keterlibatan yang cukup besar dalam pemilu Amerika Serikat. Diplomat Rusia mendapatkan pemberitahuan *persona non grata* atau orang-orang yang tidak diinginkan oleh Amerika Serikat sebagai Negara penerima. *Persona non grata* itu diberikan kepada diplomat Rusia karena Amerika Serikat melihat campur tangan diplomat Rusia yang cukup besar dalam kepentingan politik Amerika Serikat atau proses pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun 2016. Hal ini merupakan salah satu kebijakan luar negeri yang cukup mengejutkan oleh presiden Barack Obama yang pada saat itu

masih menjabat sebagai presiden Amerika Serikat. Hal ini membuat hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia yang telah dibangun dengan baik selama ini menjadi tegang. Apalagi campur tangan Rusia ini adalah dengan tujuan untuk dapat memenangkan Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat. Hal ini membuat Barack Obama memberi peringatan agar memilih Hillary Clinton khususnya kepada anggota partai demokrat karena nasib dunia khususnya Amerika Serikat sedang terancam.

B. Politik Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Rusia.

Sejak Perang Dunia II, budaya dan politik Amerika Serikat meyakini bahwa presiden merupakan aktor yang lebih kuat dan mempunyai kemampuan yang luar biasa. (Noon, 2016) Karakteristik dan gaya seorang presiden adalah kunci dalam mencapai tujuan yang diinginkan dari masyarakat. Kebijakan Amerika Serikat meletakkan Rusia sebagai Negara yang penting bagi Amerika Serikat. Dan Rusia dipandang sebagai mitra penting Amerika Serikat dalam melestarikan dan memperkuat rezim nonproliferasu nuklir. Namun, sejak berakhirnya Perang Dingin bagi politik internasional memusatkan perhatian pada hubungan Amerika Serikat dan Rusia. Rusia tentu saja mempengaruhi kesadaran Amerika Serikat karena cadangan minyak dan gasnya yang besar dan perannya yang penting sebagai pemasok energi bagi sekutu lama dan baru di Eropa. (Aggarwal & Govella, Responding to a Resurgent Russia : Russia Policy and Responses From the European Union and the United States, 2012)

Ketika industri minyak dan gas Rusia berada dalam keadaan yang kacau setelah runtuhnya Uni Soviet, hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia terbatas pada visi yang melekat pada perusahaan minyak besar di Amerika Serikat. Dalam tahun-tahun terakhir Boris Yeltsin menuju Vladimir Putin fokus Amerika Serikat yaitu pada masalah sumber daya energi Rusia. (Aggarwal & Govella, Responding to a Resurgent Russia : Russia Policy and Responses From the European Union and the United States, 2012)

Pada tahun 2001, ketika Amerika Serikat berada di bawah kepemimpinan George W. Bush yang dikenal sering menggunakan emosi, kebijakan luar negeri Amerika Serikat adalah keyakinan bahwa Amerika Serikat memiliki tanggung jawab dan kewajiban moral untuk mempromosikan kebebasan di seluruh dunia. Membiarkan Negara-negara di dunia untuk menentukan arah mereka sendiri merupakan cara untuk mendapatkan dukungan, rasa percaya, dan rasa hormat terhadap Amerika Serikat. Selain itu, Amerika Serikat juga berusaha untuk mempertahankan posisinya sebagai satu-satunya Negara adikuasa pasca runtuhnya Uni Soviet. Aspek penting lainnya dari kebijakan luar negeri adalah Amerika Serikat akan menggunakan posisinya sebagai Negara adikuasa untuk mengamankan kepentingan nasionalnya dan mendukung pemerintah demokratis di seluruh dunia. (Rzepecka, 2018)

Setelah serangan teroris 11 September di Amerika Serikat, kepemimpinan Amerika berusaha mengembangkan kemitraan dengan Rusia. Namun, banyak dalam kelas politik Amerika Serikat memandang strategi internasional Rusia sebagai ancaman terhadap posisi Amerika Serikat di dunia. Pada saat itu, Rusia telah mengalami beberapa serangan teroris domestik dan banyak orang Rusia bersimpati dengan Amerika Serikat dan memberikan dukungan kepada rakyat Amerika Serikat dan pemerintah mereka. Presiden Vladimir Putin pertama memanggil presiden George Bush untuk menyatakan dukungan dan berjanji untuk membantu Amerika Serikat dalam pertarungan melawan teror. Dalam menanggapi tawaran dukungan Putin, Bush menunjukkan perubahan dalam persepsi Amerika Serikat terhadap Rusia. Sebelumnya, pemerintahan Bush tidak melihat adanya potensi dalam hubungan dengan Rusia. Pemerintahan Bush mengancam untuk mengakhiri bantuan ekonomi kecuali proyek-proyek nonproliferasi. Hingga akhirnya pada bulan Februari 2001, penasihat Keamanan Nasional Bush, Condoleezza Rice bersikeras bahwa Rusia adalah ancaman bagi Amerika Serikat. Setelah serangan-serangan itu, Amerika Serikat semakin mantap untuk menjadikan Rusia sebagai mitra strategis yang setara dan

berpotensi dalam perang melawan teror. Hubungan baik antara Bush dan Putin yang terlihat pada pertemuan pertama mereka di Ljubljana, Slovenia pada tahun 2001. Dimana pertemuan itu diperkuat dengan mengatasnamakan kepentingan nasional. (Aggarwal & Govella, *Responding to a Resurgent Russia : Russia Policy and Responses From the European Union and the United States*, 2012)

Saat itu juga, Bush menyatakan keyakinannya pada kmitmen Rusia terhadap prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis dan rasa hormatnya terhadap jalur politik Rusia. Hubungan Amerika Serikat dan Rusia juga meningkat di bidang kemanan militer. Pada akhir 2001, sekretaris jenderal NATO Lord Robertson, didukung oleh presiden Bush dan Perdana Menteri Tony Blair menganjurkan agar Rusia diberi status yang setara dengan anggota tetap lainnya termasuk hak veto dalam keputusan tertentu. Deklarasi bersama tentang kerja sama energy Amerika Serikat dan Rusia di KTT adalah titik tertinggi dalam hubungan kedua negara tersebut. Akhirnya, pemerintah Amerika Serikat menunjukkan minat dalam mengembangkan kemitraan energi dengan Rusia untuk memperkuat hubungan bilateral. (Aggarwal & Govella, *Responding to a Resurgent Russia : Russia Policy and Responses From the European Union and the United States*, 2012)

Gedung Putih melihat Rusia sebagai Negara yang kurang demokratis. Perbedaan dari nilai-nilai demokratis dapat membahayakan hubungan Amerika Serikat dan Rusia. Amerika Serikat mengambil sejumlah langkah konsolidasi Negara dalam menanggapi ancaman teroris. Sekretaris Negara saat itu, Colin Powell mendesak Kremlin untuk tidak membiarkan perang melawan terorisme yang membahayakan proses demokrasi. Sejalan dengan strategi perubahan rezim barunya, Amerika Serikat mendorong seluruh wilayah bekas Uni Soviet untuk mengubah lembaga-lembaga politiknya serta menyediakan dana untuk mendukung oposisi revolusi di Georgia, Ukraina, dan Kirgistan. Hubungan di bidang keamanan militer menjadi kurang baik. Selain menarik

diri dari perjanjian ABM atau *Anti-Balistic Missile*, Amerika Serikat juga mengambil langkah-langkah untuk memajukan infrastruktur militernya lebih dekat dengan perbatasan Rusia sehingga menimbulkan kecurigaan pada Rusia. Dalam menanggapi hal tersebut, presiden Putin mengumumkan keputusannya untuk mendeklarasikan moratorium penerapan perjanjian pasukan konvensional di Eropa sehingga Rusia bisa secara bebas memindahkan pasukan konvensionalnya. (Aggarwal & Govella, *Responding to a Resurgent Russia: Russia Policy and Responses From the European Union and the United States*, 2012)

Birokrasi dijadikan sebagai pelaksana kebijakan presiden Amerika Serikat. Pada awalnya, staf birokrasi Amerika Serikat dalam hal ini Departemen Luar Negeri (*Department of State*) berjumlah kurang dari 12 orang, kemudian jumlahnya bertambah 1000 orang lebih. Departemen Luar Negeri membantu presiden Amerika Serikat untuk mengambil sebuah keputusan politik luar negeri. Selain membantu melancarkan tugas presiden, birokrasi pemerintah juga menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Setelah Perang Dingin, fokus utama Departemen Luar Negeri bukan lagi ancaman Uni Soviet, tetapi pada isu-isu demokratisasi, perdagangan dunia, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia. Runtuhnya Uni Soviet mempengaruhi anggaran Departemen Luar Negeri. Untuk merealisasikan penghematan anggaran, Departemen Luar Negeri menutup kantor perwakilan dan kedutaan di beberapa Negara. Birokrasi yang diangkat oleh presiden untuk menjadi *agency* pemerintahan, harus mendapat persetujuan dari Senat. Hal ini membuat hubungan antara presiden dan birokrasi tidak selalu baik dan presiden-presiden Amerika Serikat tidak sepenuhnya menguasai birokrasi. (Cipto, *Politik dan Pemerintahan Amerika*, 2003)

1. Politik Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Rusia Pada Era Presiden Barack Obama.

Presiden Barack Obama yang menjabat sebagai presiden Amerika Serikat selama 2 periode mempunyai strategi yang ditanam dalam kampanyenya pada tahun 2004 dan 2008. Kekuatan yang dimiliki oleh seseorang yang menjabat sebagai presiden Amerika Serikat yaitu dapat mempengaruhi perubahan politik dan sosial baik di tingkat domestik maupun internasional. Setelah berhasil memenangkan pemilihan yang kedua baginya pada tahun 2008, Barack Obama mulai untuk merangkul dua tradisi dari nilai-nilai agama yang menjadi dasar di Amerika Serikat yaitu Kristen yang didirikan oleh George Washington dan warisan agama dan ras. Pada masa kepemimpinan Barack Obama, usaha yang dilakukan yaitu membuktikan bahwa demokrasi merupakan alat dan instrumen yang pantas untuk memperoleh tujuan-tujuan sosial dan perubahan politik dari Amerika Serikat untuk membuat Negara lebih terlihat sempurna. (Dunn, 2018)

Pemerintahan presiden Barack Obama yang dimulai pada Januari 2009 memiliki prioritas yang besar untuk mempertahankan hubungan yang baik dengan Negara-negara di dunia. Hal utama dalam kebijakan luar negeri presiden Barack Obama adalah menjalin kerja sama dengan Negara-negara yang mempunyai kekuatan besar di dunia termasuk Tiongkok dan Rusia. Para pemimpin Rusia dan Tiongkok fokus untuk respon terhadap pengaruh Amerika Serikat yang besar dan juga membatasi kekuasaan Amerika Serikat baik dalam bidang politik, ekonomi, dan keamanan dunia. Dalam hal ini, Tiongkok melihat Rusia sebagai sebuah Negara yang mampu menyeimbangi kekuatan Amerika Serikat. (Sutter, 2017)

Sejak awal pemerintahan Barack Obama, juru bicara presiden sendiri menekankan pentingnya Rusia. Rusia tetap menjadi satu-satunya tenaga nuklir yang sebanding dengan Amerika Serikat. Rusia merupakan produsen terbesar di dunia dan Amerika Serikat adalah konsumen terbesar di dunia. Dan

sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Rusia akan memiliki suara berpengaruh pada tantangan diplomatik yang paling penting. Pada awal Juli 2009, ketika Obama berpidato kepada para siswa di sekolah ekonomi baru Rusia, Obama berbicara tentang keinginan agar Rusia menduduki tempat yang selayaknya sebagai sebuah Negara yang memiliki kekuatan besar. (Aggarwal & Govella, *Responding to a Resurgent Russia: Russia Policy and Responses From the European Union and the United States*, 2012)

Pada bulan-bulan pertama menjadi seorang presiden Amerika Serikat, strategi besar Barack Obama adalah menyatukan kekuatan-kekuatan militer dan ekonomi Amerika Serikat sebelumnya dan berkomitmen untuk memperbarui kepemimpinan Amerika Serikat. Di bawah kepemimpinan Barack Obama kebijakan luar negeri lebih mengedepankan keterlibatan strategis. Keterlibatan strategis Obama ini merangkul kembali tatanan internasional yang bergeser, dan peregangan militer serta publik. Hubungan Amerika Serikat dan Rusia maupun Tiongkok, pada kepemimpinan Barack Obama dilakukannya mengatur ulang hubungan antara Negara-negara tersebut, menjauhi perang, dan berjanji untuk mematuhi norma-norma dan berbagai konvensi internasional. Barack Obama berulang kali menekankan untuk menjalin hubungan global baru berdasarkan kepentingan bersama dan saling menghormati. (Singh, *Barack Obama's Post-American Foreign Policy the Limits of Engagement*, 2012)

Barack Obama menjadikan pembaruan dan peningkatan hubungan bilateral dengan Rusia menjadi tujuan utama dalam kebijakan luar negerinya. Hubungan Amerika Serikat yang baik dengan Moskow ini menimbulkan sejumlah keuntungan strategis untuk Amerika. Pemerintahan Barack Obama berusaha keras untuk memperlakukan Rusia dengan rasa hormat. (Singh, *Barack Obama's Post-American Foreign Policy The Limits of Engagement*, 2012)

Ketika pemerintahan Obama menetapkan dan menegaskan kembali kepemimpinan Amerika Serikat dalam upaya untuk menghambat perubahan iklim global dan peran

dari Tiongkok yang sangat penting. Selain Tiongkok, Rusia juga merupakan pemain penting dalam persaingan memperebutkan cadangan hidrokarbon yang luas di wilayah Artik. Selain itu, Rusia yang menjadi ancaman besar bagi kesejahteraan global pasca runtuhnya Uni Soviet. Dalam pidatonya di Moskow Juli 2009, Obama meyakinkan masyarakat Rusia bahwa Amerika Serikat menginginkan Rusia yang kuat, damai, dan makmur serta memberikan kepercayaan bahwa kedua Negara dapat menjalin kerja sama dengan baik. Hal tersebut menggambarkan kepentingan nasional Amerika Serikat. (Aggarwal & Govella, *Responding to a Resurgent Russia : Russia Policy and Responses From the European Union and the United States*, 2012)

C. Politik Luar Negeri Rusia Setelah Runtuhnya Uni Soviet.

Pada tanggal 12 Juni 1990, Rusia diproklamkan sebagai sebuah Negara yang berdaulat. Sebagai sebuah Negara pewaris garis politik Uni Soviet, Rusia harus tetap menjaga *high profile* dari Uni Soviet yang merupakan salah satu Negara adidaya. Pasca perang dingin keadaan politik internasional yang dihadapi Rusia lebih berat dari yang dihadapi oleh Uni Soviet ketika bentrok dengan rivalnya Amerika Serikat. Peninggalan wilayah yang begitu besar, struktur masyarakat yang plural hingga kondisi ekonomi yang kurang baik merupakan permasalahan berat yang harus diatasi oleh Kremlin Rusia. Prioritas utama dari kebijakan luar negeri Rusia saat mengalami ancaman terisolasi secara geopolitik yaitu memperkuat hubungan dengan Negara-negara bekas Uni Soviet yang tergabung dalam CIS (*Commonwealth of Independent States*) atau persemakmuran Negara-negara merdeka, Negara-negara di kawasan Eropa, Amerika serta Asia. Hal ini diambil untuk menyelamatkan keamanan Rusia di bidang geopolitik, setelah runtuhnya Uni Soviet. Selain bidang geopolitis, kerjasama dalam bidang politik dan militer juga dilakukan untuk dapat menyelesaikan konflik di Negara-negara CIS termasuk pemberantasan terorisme. (Fahrudji, 2005)

Commonwealth of Independent States atau CIS dibentuk agar dapat memfasilitasi proses disolusi dari Uni Soviet secara damai (*to allow a civilized divorce of the USSR*). CIS mengikuti langkah yang diambil Uni Eropa karena Uni Eropa juga membicarakan mengenai permasalahan politik maupun ekonomi. Rusia kini berorientasi pada pembangunan dan kemajuan, terutama pembangunan dan kemajuan di bidang ekonomi dan politik. Namun CIS yang beranggotakan 15 Negara kini menjadi 2 Negara yang masih bertahan dan aktif, yaitu Rusia dan Belarusia. (Samuel, 2017)

Rusia melakukan reformasi politik dan reformasi ekonomi agar dapat menjadikan Rusia lebih demokratis. Reformasi politik yaitu dalam pemilihan dewan rakyat dan presiden masyarakat mendapatkan hak-hak politik. Dalam reformasi ekonomi, Rusia melakukan liberalisasi ekonomi. Salah satu metode yang diambil adalah *Shock Therapy* yaitu dengan melakukan privatisasi terhadap badan-badan usaha milik Negara. Ternyata demokrasi tidak mampu sepenuhnya mengatasi permasalahan yang terjadi. Penerapan demokrasi tidak mampu membuat keadaan masyarakat menjadi lebih baik walaupun dengan mengedepankan partisipasi aktif, kebebasan masyarakat, dan berkompetisi. Sistem komunis dianggap lebih baik oleh sebagian masyarakat Rusia dibanding dengan demokrasi liberal. Pada era sistem komunis, jaminan kesehatan dan kebutuhan hidup sehari-hari terbukti lebih baik. (Saputra, Dari Uni Soviet Hingga Rusia : Sejarah Panjang, Para Aktor Revolusi, Serta Politik Perang Dingin Rusia Sampai Sekarang, 2014)

Setelah runtuhnya Uni Soviet, Rusia kehilangan gelar Negara adikuasa dan berada dalam situasi krisis sistem yang mengguncang segala bidang baik di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun militer bahkan mengancam disintegrasi Negara yang dulunya kuat. Pengaruh Rusia menjadi terpinggirkan di mata dunia internasional. Keadaan Rusia tidak sehat ketika berada di bawah kepemimpinan Boris Yeltsin sebagai presiden pertama Rusia pasca Perang Dingin. Berbeda ketika masih menjadi Negara bagian Uni Soviet yang memiliki sejarah yang

membanggakan, Rusia memiliki peran utama dalam kekuatan militer, politik, budaya, dan peradaban. (Milosavljevic, Jeftic, & Mladenovic, 2017)

Rusia juga mengambil kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan Negara-negara yang berada di kawasan Asia. Langkah untuk kerjasama dengan Asia ini seperti Cina, India, maupun Indonesia ini dilakukan untuk menyamakan pandangan atas masalah-masalah yang terjadi baik dalam bidang ekonomi maupun politik maupun menciptakan stabilitas di kawasan Asia Selatan.

Dalam hubungan Amerika Serikat dan Rusia, terdapat empat fokus. Yang pertama adalah keamanan nuklir, bagaimana Rusia dan Amerika Serikat berhubungan dalam mengembangkan opsi tenaga nuklir sipil, kontrol senjata strategis, dan mengelola dunia nuklir multipolar adalah kunci untuk hubungan mereka. Kedua adalah keamanan energi. Ketiga, Moskow dan Washington perlu menghadapi sumber ketegangan utama. Dalam menghadapi ketegangan atas interaksi Amerika Serikat dan Rusia pasca runtuhnya Uni Soviet, fokus yang keempat adalah keamanan Eropa. Untuk itu, kebijakan Amerika Serikat, NATO, dan Rusia di wilayah pasca Soviet bergantung langsung pada keberhasilan Amerika Serikat dan sekutu NATO dalam menggalang Rusia. (Aggarwal & Govella, 2012)

1. Politik Luar Negeri Rusia Pada Era Boris Yeltsin.

Ketika Uni Soviet runtuh, kepala pemerintahan Rusia dipegang oleh Boris Yeltsin. Boris Yeltsin menang dalam pemilihan presiden yang dilaksanakan pada tahun 1996. Dalam pemilihan presiden tersebut, Boris Yeltsin merupakan salah satu kandidat yang memperoleh suara terbanyak yakni 35,28 persen bersama rivalnya Gennady Zyuganov yang memperoleh 32,04 persen dalam putaran I pada tanggal 16 Juni 1996, setelah akhirnya Boris Yeltsin berhasil menang dari Gennady Zyuganov dalam putaran II dengan perolehan suara 40.308.384 suara atau 53,82 persen yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 1996. (Fahrurudji, Rusia Baru Menuju

Demokrasi : Pengantar Sejarah dan Latar Belakang Budayanya, 2005)

Pada masa pemerintahan Boris Yeltsin, langkah yang diambil yaitu melakukan reformasi politik yaitu hak-hak politik yang didapat oleh masyarakat dan ekonomi yaitu melakukan liberalisasi ekonomi untuk membawa arah pemerintahannya menjadi lebih demokratis. (Andi, 2014) Selain itu Boris Yeltsin juga menerapkan *Shock Therapy* dalam pemerintahannya sebagai cara untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi. Pada bulan Oktober 1991, Yeltsin memublikasikan bahwa *Shock Therapy* akan dijalankan pada bulan Januari 1992, walaupun dengan keadaan Rusia yang masih memiliki hutang luar negeri. *Shock Therapy* ini dipilih untuk memusnahkan pengendalian pasar. Bagian-bagian pokok dari *Shock Therapy* ini yaitu : stabilisasi ekonomi makro; keseimbangan pembayaran baik belanja maupun pendapatan; liberalisasi harga; liberalisasi perdagangan; *Currency convertibility* yang merupakan pertukaran nilai mata uang; privatisasi; restrukturisasi perusahaan; serta pembaruan institusi. Namun dalam pelaksanaan *Shock Therapy* itu sendiri mengalami kegagalan dan membawa masalah baru bagi ekonomi Rusia. Kondisi ekonomi yang buruk merupakan salah satu hambatan besar bagi masa depan demokrasi Rusia. Contohnya dalam praktik upaya liberalisasi yang hanya melekatkan politik dengan uang. Semakin terlihat jelas kepentingan pribadi lebih diutamakan dari pada kepentingan bersama di lingkungan birokrasi. Untuk masalah ekonomi proses pengambilan keputusan sering dilakukan secara tertutup. Dampak dari ekonomi *Shock Therapy* Yeltsin membuat Rusia mengalami krisis yang luar biasa. (Sunaryono, 2012)

Konsekuensi dari upaya Rusia menuju sistem pasar bebas pada masa pemerintahan Boris Yeltsin yaitu proses swastanisasi. Proses swastanisasi ini artinya kepemilikan bersama dan setengah dari kepemilikan Negara harus dialihkan kepada kepemilikan swasta atau pribadi. Proses ini memunculkan kelompok baru dalam masyarakat Rusia dan

menguntungkan kelompok tertentu, khususnya yang dekat dengan kekuasaan. Dari sinilah terbentuk kelompok kecil yang menguasai sumber-sumber penting, seperti: minyak, listrik, gas dan sumber-sumber vital lainnya. Boris Yeltsin mengakhiri masa pemerintahannya dengan mengundurkan diri pada tanggal 31 Desember 1999. (Fahrurudji, Rusia Baru Menuju Demokrasi : Pengantar Sejarah dan Latar Belakang Budayanya, 2005)

2. Politik Luar Negeri Rusia Pada Era Vladimir Putin.

Setelah presiden Boris Yeltsin mengundurkan diri, pada tahun 2000, masyarakat Rusia mulai mencari pemimpin baru untuk mengatasi permasalahan yang dialami Rusia. Dalam pemilihan umum presiden yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2000 itu diikuti oleh 4 Kandidat termasuk Vladimir Putin selaku *acting* presiden. Berbeda dengan Boris Yeltsin yang harus melewati dua putaran dalam pemilihan presiden, Vladimir Putin langsung memenangkan pemilu pada putaran pertama. Putin mampu memperoleh 39,7 juta atau 52,94 persen suara dan menjadi presiden ke-2 di Rusia. (Fahrurudji, Rusia Baru Menuju Demokrasi : Pengantar Sejarah dan Latar Belakang Budayanya, 2005)

Pada tanggal 8 Juli 2000 dalam pidato kenegaraannya, prioritas utama Vladimir Putin adalah pada bidang ekonomi untuk mengatasi krisis ekonomi yang dialami Rusia pada era Boris Yeltsin. Adapun prioritas-prioritas utama Vladimir Putin, (Sunaryono, Rusia Pascakomunisme Jalan Panjang Menuju Perubahan, 2012) adalah sebagai berikut:

1. *Guaranteein property righ;*
2. *Stopping the preferential treatment of some business over others and ending unnecessary state intervention in business;*
3. *Lowering the tax burden;*
4. *Simplifying the customs system;*
5. *Developing banks and other economic infrastrucur;*

6. *Reorganizing the welfare system by reducing the number of benefits.*

Hadirnya Vladimir Putin sebagai presiden Rusia yang baru membawa Rusia pada tahap yang lebih baik. Mulai dari reformasi politik, ekonomi, dan sosial serta perubahan dalam kebijakan luar negeri dan keamanan. Sejak awal, Putin berusaha untuk menjadikan orang-orang terdekatnya naik ke tingkat pemerintahan. Mekanisme efektif kontrol Negara merupakan hal yang paling menguntungkan bidang ekonomi Rusia yang telah ditetapkan sebelumnya dalam strategi industri terutama dalam industri minyak, gas, dan sektor logam tetap dijalankan dan dilaksanakan pada rezim Putin. Prioritas utama rezim politik Vladimir Putin adalah distribusi pendapatan yang merata untuk meningkatkan standar hidup dan status sosial warga Rusia. Selain itu, prioritas lainnya adalah kontrol akan sumber daya alam, dukungan kepada reformasi dan perusahaan swasta, memperkuat ekonomi Rusia dan posisi Rusia di dunia internasional sebagai sebuah Negara yang kuat dan besar. (Milosavljevic, Jeftic, & Mladenovic, Vladimir Putin and Analysis of the Role of Leaders in the Formation and Implementation on of State Policy in Contemporary Russia : Reviews and Critics of Putin's Regime, 2017)

Pada masa pemerintahannya, Vladimir Putin melanjutkan kebijakan reformasi dan ekonomi pasar bebas yang telah dijalankan oleh presiden Boris Yeltsin bahkan pada masa Gorbachev. Namun, dalam mengangkat ide-ide reformasi, Vladimir Putin memiliki pandangan yang berbeda. Sejak awal pemerintahannya, Putin lebih menekankan pada elit pengusaha yang menguasai sebagian besar perekonomian Rusia. Setelah menempati posisi tertinggi pemerintah Rusia, presiden Putin akan mengumumkan beberapa program reformasi di bidang politik dan ekonomi dalam upaya mengeluarkan Rusia dari permasalahan yang terjadi. (Fahrurodji, Rusia Baru Menuju Demokrasi : Pengantar Sejarah dan Latar Belakang Budayanya, 2005)

Pada tanggal 1 Januari 2004, kebijakan sistem anggaran berimbang diumumkan untuk menyeimbangkan dana Rusia di saat harga minyak jatuh dan juga dijadikan sebagai dana kesejahteraan nasional Rusia. Pada tahun 2004, pemerintah menetapkan minyak komoditas stabilisasi dana yang merupakan bagian dari *balanced budget*. Dana stabilisasi ini digunakan untuk membayar asing dan menutup defisit dana pension Rusia serta membayar hutang Rusia kepada Paris Club sebesar 123,8 milyar rubel. (Sunaryono, Rusia Pascakomunisme Jalan Panjang Menuju Perubahan, 2012)

Vladimir Putin telah berhasil membuat Rusia menata diri baik dalam negeri maupun luar negeri. Politik luar negeri Rusia di bawah kepemimpinan Vladimir Putin mampu menjadikan Rusia lebih bermartabat dan dihormati. Kebijakan politik luar negeri Vladimir Putin mampu membuat Rusia lebih mandiri dan merdeka dalam menentukan visi dan misi politik luar negerinya yang bebas dari intervensi kepentingan asing. Selain itu, pada masa pemerintahannya yang berlangsung pada tahun 2000 hingga 2008, Putin mampu membawa Rusia bangkit dari keterpurukan ekonomi, politik, dan teknologi. Terlepas dari strategi politik yang dilakukan, Vladimir Putin telah mampu membawa perubahan. Rusia menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Rusia menjadi bagian dari anggota APEC, G-20, dan BRIC. Masuknya Rusia dalam blok-blok ekonomi dunia itu kian menegaskan bahwa Rusia bukan hanya sebagai penyebar ideologi komunis-sosialis, tetapi juga hadir dalam geliat ekonomi dunia. Rusia kini menjadi kekuatan baru. (Saputra, Dari Uni Soviet Hingga Rusia : Sejarah Panjang, Para Aktor Revolusi, Serta Politik Perang Dingin Rusia Sampai Sekarang, 2014)

Tabel 2.1 Daftar nama Presiden dan Perdana Menteri pasca Uni Soviet.

Periode	Presiden	Perdana Menteri
Juni – Desember 1991 Desember 1991 – Juni 1996	Boris Yeltsin	Yegor Gaidar (Desember 1991 – Desember 1992) Victor Chernomyrdin (Desember 1992 – 23 Maret 1998)
Juni 1996 – Desember 1996	Boris Yeltsin	Victor Chenomyrdin Sergei Kirienko (Maret – 24 Agustus 1998) Yevgeny Primakov (September 1998 – Mei 1999) Sergei Stepashin (Mei – Agustus 1999) (Agustus – Desember 1999) Vladimir Putin
Januari 2000 – Maret 2004 Maret 2004 – sekarang	Vladimir Putin Vladimir Putin	Mikhail Kasyanov (2000 – 2004) Mikhail Fradkov (2004 – sekarang)

3. Politik Luar Negeri Rusia Pada Era Dmitry Medvedev.

Pada tahun 2006 dan 2007 saat Dmitry Medvedev belum maju menjadi calon presiden Rusia, secara khusus Medvedev terlibat dalam implementasi kebijakan presiden Vladimir Putin ketika Medvedev bertanggung jawab untuk mengawasi proyek-proyek nasional dan arena proyek-proyek itulah Medvedev mendapat lebih banyak perhatian bahkan sebagai penerus Putin. (Pacer, 2016)

Pada tahun 2008, transisi kursi kepresidenan Rusia dari presiden Vladimir Putin ke presiden Dmitry Medvedev berjalan lancar. Dmitry Medvedev menekankan bahwa kelanjutan pemerintahannya berasal dari kebijakan presiden sebelumnya yaitu Vladimir Putin. Pada bulan Februari 2008, sebelum terpilih menjadi presiden Rusia, Medvedev memberikan pernyataan bahwa dia akan melanjutkan kebijakan yang telah terbukti efektif selama delapan tahun terakhir yaitu waktu dimana Vladimir Putin terpilih menjadi presiden dan Medvedev juga menyatakan bahwa dia akan bekerja satu tim dengan Putin jika hal itu merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi Negara. Setelah terpilih sebagai presiden Rusia, sistem politik Rusia ditandai dengan istilah “tandemokrasi”. (Smith, 2010)

Medvedev dalam pidato kenegaraannya yang pertama menyampaikan beberapa perubahan politik yang akan meningkatkan sistem politik Rusia pada November 2008, yaitu jaminan untuk pemilih yang memilih partai kecil; menghapuskan pemberian uang sebagai jaminan dalam pemilihan umum; dewan federasi hanya boleh terdiri dari orang-orang yang dipilih untuk majelis perwakilan dan wakil dari badan pemerintahan; pengurangan anggota bagi yang ingin mendaftarkan partai politik baru; dibuat undang-undang tentang partai politik sehingga wajib untuk dirotasi bagi kepemimpinan partai agar tidak lagi orang-orang yang menjabat di partai politik selama lebih dari waktu yang ditetapkan; dan kebebasan berbicara yang didukung oleh teknologi, internet gratis dan televisi digital harus diperluas.

(Smith, Russian Series : Medvedev and the Modernisation Dilemma, 2010)

Pada awal kepemimpinannya, Medvedev memperjelas proyek mana yang akan menjadi catatan kunci pada masa jabatannya yaitu modernisasi kehidupan ekonomi, politik, dan sosial Negara Rusia serta mengekang korupsi. Istilah tandemokrasi atau tandem ditujukan pada sistem politik Rusia setelah Medvedev menjadi presiden Rusia. Tandem diproyeksikan pada presiden dan Perdana Menteri dengan otoritas yang sama berdasarkan perjanjian pribadi bukan konstitusional. Seorang analis Rusia menulis bahwa istilah terbaik untuk menggambarkan hubungan yang berkembang antara presiden Dmitry Medvedev dan Perdana Menteri Vladimir Putin adalah tandemokrasi karena hubungan tersebut didasarkan pada perjanjian pribadi bukan konstitusi. (Black, 2015)

Survei menunjukkan mayoritas masyarakat Rusia sepenuhnya mendukung tandem. Dengan melegitimasi tandem, presiden melepaskan otoritas dan Perdana Menteri memperoleh wewenang. Selain itu, untuk tetap efektif, tandem tidak punya pilihan selain menahan diri dari saling mengkritik. (Black, The Russian Presidency of Dmitry Medvedev, 2008-12 : The Next Step Forward or Merely A Time Out?, 2015)

Sebagai presiden Rusia, Medvedev membutuhkan Putin untuk menyelesaikan segala sesuatu karena selain sebagai Perdana Menteri, Putin juga merupakan kepala pemerintahan dan juga ketua Rusia bersatu dimana dukungannya dibutuhkan Medvedev dalam pengesahan undang-undang. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Medvedev tidak dapat mengambil suatu tindakan yang bertentangan dengan keinginan dari Putin karena akan mengakibatkan pembekuan pemerintah. Dalam kebijakan luar negeri, Medvedev dipandang sebagai seorang liberal sejati yang berpikir bahwa kebijakan luar negeri ditentukan oleh kebijakan dalam negeri. Sementara Putin merupakan seorang yang realis yang fokus pada faktor struktural dalam sistem internasional yang menentukan bagaimana Negara

berperilaku. (Pacer, Russian Foreign Policy under Dmitry Medvedev, 2008-12, 2016)

Pada Desember 2009, Medvedev mengambil sikap untuk perubahan politik. Perubahan pada sistem politik yang diambil Medvedev tampaknya mencerminkan sistem politik yang lebih pluralistik dan hal itu cukup berbeda dengan era Putin. Hal tersebut disampaikan Medvedev dalam pidatonya pada Januari 2010, bahwa sistem politik Rusia perlu dimodernisasi agar dapat menggambarkan keragaman ideologis dan budaya. Pada September 2010, Medvedev menguraikan lima kriteria yang dianggapnya penting untuk sistem demokrasi. Proses modernisasi politik yang telah dibicarakan Medvedev dan telah menjadi motif utamanya sejak tahun 2009, tidak hanya pada bidang politik namun juga fokus pada bidang ekonomi. Ekonomi yang terlalu bergantung pada produksi bahan baku merupakan kekhawatiran dari kepemimpinan Rusia sehingga mengharuskan jalannya proses modernisasi baik dalam bidang politik dan ekonomi. Prioritas Medvedev adalah mendorong maju ekonomi bahan baku lama dan harus memulai modernisasi dan peningkatan teknologi di seluruh sektor industri. Menurut Medvedev tidak ada yang dilakukan dalam sepuluh tahun terakhir untuk perubahan struktural dalam ekonomi karena naiknya harga minyak. (Smith, Russian Series : Medvedev and the Modernisation Dilemma, 2010)

Hasil survei masyarakat yang diterbitkan pada Desember 2009, menunjukkan bahwa sebagian besar orang Rusia skeptis tentang kemungkinan keberhasilan dalam setiap upaya untuk memodernisasi Negara Rusia baik di bidang politik maupun ekonomi. Mereka tidak memiliki pemikiran yang sejalan mengenai masyarakat yang mampu melakukan inovasi ataupun pendekatan apa yang harus diambil. Presiden Medvedev juga menggerakkan serangkaian konsultasi tentang cara-cara untuk memodernisasi Rusia yaitu di sepanjang garis yang dipromosikan dalam artikelnya ada "*Go Rusia*" di dalamnya. Dalam artikel itu, Medvedev sangat kritis terhadap ekonomi bahan baku Rusia, korupsi, kurangnya kebebasan dan

ketidakadilan yang berkelanjutan. Medvedev mengatakan lembaga-lembaga demokrasi Rusia mempunyai kualitas yang rendah, masyarakat sipilnya lemah, dan kemandirian hampir tidak ada. Modernisasi ini merupakan satu hal yang perlu bagi Rusia dan penting, tetapi dalam melakukan modernisasi tidak boleh terburu-buru. (Black, *The Russian Presidency of Dmitry Medvedev, 2008-12 : The Next Step Forward or Merely A Time Out?*, 2015)

Keyakinan Medvedev bahwa kebijakan luar negeri dipengaruhi dari kondisi domestik dapat dilihat dari prioritas Rusia dalam membangun hubungan dengan Uni Eropa, tetangga persemakmuran negara-negara merdeka (CIS), dan negara-negara Amerika Utara untuk mengamankan investasi, teknologi dan sumber-sumber inovasi lainnya untuk memodernisasi ekonomi Rusia. Dibawah kepemimpinan Medvedev mengedepankan hubungan baik Rusia-Barat dimana hal itu terlibat pada tahun 2008 hingga 2012 dengan meningkatnya pengaruh gagasan liberal pada kebijakan luar negeri dan dalam negeri Rusia dan penekanan pada peningkatan hubungan Rusia dengan Amerika Serikat juga Uni Eropa. (Pacer, *Russian Foreign Policy under Dmitry Medvedev, 2008-12*, 2016)

Hubungan Rusia dan Amerika Serikat pada masa kepemimpinan cukup baik, hal itu terlihat dari hubungan yang terjalin dengan Barack Obama sebagai Presiden Amerika Serikat pada saat itu dan beberapa pertemuan yang terjadi. Pada bulan April 2009 dalam pertemuan G20 di London, Barack Obama dan Dmitry Medvedev menyatakan bahwa Amerika Serikat dan Rusia siap untuk memetakan awal yang baru dalam hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia. (Singh, *Barack Obama's Post-American Foreign Policy The Limits of Engagement*, 2012)

Pada bulan September, Barack Obama dan Dmitry Medvedev bertemu kembali pada pertemuan Majelis Umum tahunan Amerika Serikat di New York. Pada saat itu, Dmitry Medvedev menerangkan bahwa Rusia akan bergabung dengan Amerika Serikat dan Negara-negara barat lainnya

sehingga dapat menekan Iran untuk membatasi program nuklirnya. Dimana hal itu merupakan salah satu tujuan utama Amerika Serikat dalam kebijakan mengatur ulang hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia ini, yaitu membuat Moskow sepenuhnya dapat bergabung dan bersama-sama mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. (Isikoff & David, *Russian Roulette The Inside Story of Putin's War on America and The Election of Donald Trump*, 2018)

Hingga akhirnya pada 24 September 2011, Medvedev mengusulkan kepada kongres Rusia Bersatu bahwa Putin lah yang akan menjadi calon presiden selanjutnya. Kemudian Putin naik podium untuk menerima partai Rusia Bersatu. Putin mengatakan bahwa prioritas utamanya adalah memodernisasi ekonomi dan mengekang korupsi. Selain itu, Putin juga mengatakan bahwa yang paling cocok menggantikannya sebagai Perdana Menteri adalah Dmitry Medvedev. Dalam sebuah pertemuan para pemimpin bisnis dan politik di Kremlin, Medvedev menyampaikan salah satu pidato terkahirnya yaitu Medvedev berjanji untuk terus memperluas kebebasan politik dan ekonomi di Rusia, memerangi korupsi dan memodernisasi ekonomi. Pada saat yang sama, Putin mengundurkan diri sebagai ketua partai Rusia Bersatu dan merekomendasikan Medvedev untuk menduduki jabatan tersebut. (Black, *The Russian Presidency of Dmitry Medvedev, 2008-12 : The Next Step Forward or Merely A Time Out?*, 2015)